

9. URUSAN PERHUBUNGAN

Transportasi dan perhubungan merupakan sektor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Transportasi berfungsi menjembatani antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Pembangunan transportasi sangat diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, seperti memberikan kelancaran mobilitas masyarakat serta menjamin keselamatan perjalanan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi di Indonesia. Sesuai dengan Ketentuan umum Sistem Transportasi Nasional, pembangunan transportasi bertujuan untuk mewujudkan transportasi dan perhubungan yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi orang dan barang yang mantap dan dinamis mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara umum pembangunan infrastruktur jaringan transportasi akan mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain terutama perkembangan sektor ekonomi. Di satu sisi, perkembangan jasa transportasi akan berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi sementara di sisi lain peningkatan permintaan transportasi harus diikuti oleh pertumbuhan dalam penyediaan kapasitas fasilitas transportasi agar supaya pelayanan transportasi terselenggara secara lancar, aman dan terjangkau. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jaringan jalan).

Sistem Transportasi diarahkan pada terwujudnya keseimbangan antara permintaan jasa transportasi dan tersedianya kapasitas fasilitas transportasi. Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan transportasi yang komprehensif, lintas sektoral dan lintas wilayah.

Dalam skala kabupaten seperti di Wonosobo, unsur penting dalam urusan transportasi dan perhubungan adalah sistem transportasi darat utamanya sistem lalu lintas dan angkutan jalan darat. Kabupaten Wonosobo yang mempunyai karakteristik wilayah khas daerah pegunungan dengan dominasi daerah-daerah dengan topografi yang ekstrem dan medan yang naik turun tentunya akan membutuhkan pendekatan pembangunan transportasi dan perhubungan yang lebih sulit.

Dalam RPJMD 2016-2021 pembangunan sistem transportasi dan perhubungan dilakukan dalam rangka mewujudkan kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dengan strategi berupa penataan sistem transportasi yang efisien berdasarkan Tataran Transportasi Lokal (Tatalok) dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak bagi masyarakat. Strategi pembangunan transportasi dan perhubungan tersebut telah tertuang dalam misi pembangunan yang ke 4 yaitu "Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata".

Dalam kurun waktu 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk

IV.C.9. Urusan Wajib Perhubungan

melakukan pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar wilayah yang terintegrasi guna memperluas layanan transportasi, angkutan dan perhubungan sekaligus sebagai upaya penurunan tingkat kecelakaan transportasi.

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar perhubungan pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Kantor Perhubungan selaku *leading sector*. Sejak diberlakukan Perda SOTK OPD Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka urusan ini beralih berada di bawah *leading sector* Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

a. Program dan Kegiatan

Guna mendukung arah kebijakan tersebut, pada tahun 2016 peningkatan Pelayanan Angkutan dan perhubungan, difokuskan pada perbaikan sistem dan jaringan transportasi perkotaan Wonosobo, Kertek, dan transportasi pedesaan. Program dan kegiatan yang dilakukan melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 adalah sebesar sebesar Rp. 4.905.984.600,- .Alokasi tersebut sebagian besar dianggarkan untuk program Peningkatan Pelayanan Angkutan, program Peningkatan Tertib Lalu-lintas, program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan program Peningkatan Displin Aparatur. Seluruh program dan kegiatan pada urusan wajib perhubungan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Perhubungan kecuali program Peningkatan Tertib Lalu-lintas di Wilayah perkotaan Kertek yang dilakukan secara langsung oleh Kecamatan Kertek. Rinciannya program dan kegiatan untuk urusan wajib perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. IV.C.9.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung		
I	Kantor Perhubungan	2.206.726.600	2.095.167.172
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	694.521.000	623.270.971
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	160.110.000	146.564.133
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000	49.567.000
4	Program peningkatan pelayanan angkutan	992.095.600	983.887.750
5	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	45.000.000	44.498.000
6	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas	50.000.000	48.500.000

IV.C.9. **Urusan Wajib Perhubungan**

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
7	Program Peningkatan Tertib Lalu-lintas	215.000.000	198.879.318
II	Kecamatan Kertek	150.000.000	150.000.000
1	Program Peningkatan Tertib Lalu-lintas	150.000.000	150.000.000
B	Belanja Tidak langsung	2.549.258.000	
I	Kantor Perhubungan	2.549.258.000	2.390.554.640
1	Belanja Pegawai	2.549.258.000	2.390.554.640
2	Belanja Hibah	0	0
	Jumlah total	4.905.984.600	4.635.721.812

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung operasional pelaksanaan urusan wajib perhubungan. Pada tahun 2016, program keadministrasian ini mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp 694.521.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo.

Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan, 89,74 % nya telah terealisasi melalui kegiatan yang berupa kegiatan surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis perkantoran, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman kedinasan, biaya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan kualitas pelayanan di bidang perhubungan kepada masyarakat dicapai melalui pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman melalui lingkungan kerja yang bersih, indah dan nyaman demi mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik yang baik. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini sebagian besar adalah kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang meliputi gedung kantor, peralatan kantor serta kendaraan operasional. Untuk tahun anggaran 2016, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur telah terealisasi sebesar 91,54 %.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan disiplin aparatur dilaksanakan guna menciptakan kelancaran kegiatan SKPD kantor Perhubungan Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Realisasi kegiatan pada program ini adalah berupa pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang spesifik mengacu pada ketentuan kementerian perhubungan sebesar 99,13%.

4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Tujuan dan sasaran program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan angkutan kepada masyarakat. Dari alokasi sebesar Rp. 992.095.600,- , 99,17 % diantaranya telah direalisasikan melalui 9 item kegiatan. Khusus untuk program peningkatan pelayanan angkutan pada tahun anggaran 2016 selain didanai melalui APBD, program ini juga didanai melalui DAK yaitu untuk kegiatan DAK perhubungan sebesar Rp. 235.790.000,- dan kegiatan DAK Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pedesaan sebesar Rp. 521.305.600,-.

Realisasi program peningkatan pelayanan angkutan yang bersumber dari APBD digunakan untuk kegiatan Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor yang memang sudah membutuhkan kalibrasi ulang. Sesuai dengan SOP yang ada kalibrasi alat uji memang harus dilakukan secara berkala untuk menjaga agar hasil pengujian kendaraan bermotor tetap dapat dipertanggung jawabkan ketepatannya. Penyediaan bus angkutan lebaran juga menjadi salah satu kegiatan yang dianggarkan melalui program ini guna menambah dukungan terhadap armada angkutan lebaran bagi masyarakat Wonosobo.

Selain itu, kegiatan Operasi terpadu dan fasilitasi kegiatan Forum LLAJ juga menjadi item yang direalisasikan. Operasi terpadu termasuk upaya krusial yang harus dilakukan untuk memonitor kondisi riel di lapangan sekaligus upaya secara preventif agar pelayanan angkutan terutama angkutan umum dan angkutan barang tetap dalam kondisi yang optimal dan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan aturan.

Untuk kegiatan yang bersumber dari DAK, Dinas Perhubungan melaksanakan 2 item kegiatan yaitu DAK perhubungan dan DAK Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pedesaan. Realisasi DAK Perhubungan sebesar Rp. 232.285.000,- sebagian besar dialokasikan untuk pemasangan rambu-rambu pengaturan serta pembuatan Zebra Cross di beberapa titik yang memerlukan fasilitas penyeberangan jalan. Sedangkan realisasi DAK Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pedesaan sebesar Rp. 517.157.750,- dimanfaatkan untuk pembelian 1 buah mobil angkutan barang guna mendukung kelancaran angkutan terutama di daerah-daerah yang belum terlayani dengan baik.

5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini diwujudkan dalam kegiatan Revitalisasi Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor. Anggaran sebesar Rp 45.000.000,- telah direalisasikan 98,88 % untuk renovasi dan penyempurnaan sekaligus menambah kapasitas dan daya tampung jalur uji agar bisa digunakan oleh beragam jenis kendaraan. Langkah Revitalisasi perlu untuk dilakukan agar proses pelayanan pengujian tetap dapat dilakukan dengan baik mengingat jumlah kendaraan setiap tahunnya semakin meningkat.

6) Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini bertujuan meningkatkan upaya pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Beberapa aktifitas untuk mendukung program ini antara lain kegiatan Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas sebesar RP. 48.500.000,- (97% dari alokasi yang dianggarkan). Pemeliharaan rambu –rambu lalu lintas dan papan peringatan di tepi jalan raya bertujuan agar sarana tersebut dapat berfungsi secara baik, masyarakat dapat membaca atau mendapat informasi yang jelas daerah daerah mana saja yang rawan kecelakaan lalu lintas sehingga bagi para pengguna moda transportasi darat dapat merasa aman lancar dan nyaman. Sebagai bagian dari upaya nasional peningkatan keselamatan jalan, fasilitas rambu yang layak akan dapat mengurangi angka tingkat kecelakaan lalu lintas yang juga akan berbanding lurus dengan meminimalisasi jumlah korban kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan.

7) Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas

Program ini diwujudkan dalam kegiatan pembuatan Zona selamat sekolah (ZSS), pemindahan traffic light Sawangan dan kegiatan peningkatan penghargaan di bidang LLAJ. Termasuk di dalam penghargaan yang ditingkatkan adalah Wahana Tata nugraha (WTN), Awak Kendaraan Umum Teladan AKUT dan Indonesia Road Safety Award (IRSA).

Pembuatan Zona Selamat Sekolah direalisasikan sebesar 92,50% untuk satu titik di deakat SD Negeri Kertek guna meningkatkan keamanan bagi siswa yang lokasi sekolahnya berada di tepi jalan raya Wonosobo-Parakan tersebut.

Pemindahan traffic light Sawangan dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan sarana prasarana lalu lintas. Di Lokasi yang sebelumnya traffic light ternyata kurang berfungsi sebagai yang diharapkan dan bahkan malah menyebabkan kemacetan di titik perempatan Sawangan tersebut. Masyarakat pengguna jalan juga kesulitan untuk dapat melihat dengan jelas insruksi yang di berikan oleh lampu pengatur tersebut. Dengan pemindahan ke lokasi yang baru maka diharapkan kondisi lalu lintas di perempatan Sawangan akan lebih aman, tertib dan nyaman.

Khusus untuk program Peningkatan Tertib Lalu Lintas juga diampu oleh Kecamatan

IV.C.9. **Urusan Wajib Perhubungan**

Kertek yaitu melalui kegiatan Penanganan kemacetan arus lalu lintas di pertigaan kertek dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- yang direalisasikan seluruhnya (100 %) untuk membantu kelancaran pengaturan lalu-lintas di perempatan Pasar Kertek terutama pada jam-jam sibuk. Permasalahan kemacetan dan kerawanan kecelakaan di Kertek adalah permasalahan yang harus ditangani dan diselesaikan. Titik perempatan Pasar Kertek menjadi salah satu titik macet yang paling parah di Wonosobo dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain kondisi geometrik jalan, letak pusat Kota Kertek yang kurang menguntungkan (tusuk sate) yang diperparah dengan dekatnya pertigaan Kertek dengan pasar. Dari beberapa alternatif penyelesaian diantaranya adalah penambahan tenaga pengatur lalu lintas guna membantu petugas kepolisian di Perempatan Pasar Kertek.

c. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Kinerja Urusan Perhubungan dapat dilihat melalui indikator yang sudah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021. Pada sebagian besar indikator, semakin tinggi nilai indikator terkait maka akan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan urusan perhubungan. Capaian kinerja perhubungan dapat dilihat dalam tabel dibawah sebagai berikut dibawah ini :

Tabel IV.C.9.2
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Persentase Spot Parkir On street yang tertata	60 %	71%
2	Prosentase Tersedianya gedung parkir	0	0
3	Persentase tersedianya halte terhadap total kebutuhan halte	10%	10%
4	Rasio jumlah kendaraan (SMP) per panjang jalan (Km)	95	95
5	Persentase terminal kewenangan kabupaten yang direvitalisasi	33%	40%
6	Persentase angkutan umum laik pakai	60%	69%
7	Persentase jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil	60%	70%
8	Persentase pelayanan pengujian kendaraan bermotor	56,34%	59,45%
9	Jumlah titik blackspot yang tertangani	28,57%	28,57%
10	Persentase sekolah di tepi jalan protokol	30%	50%

IV.C.9. Urusan Wajib Perhubungan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2015	2016
	yang terpasang Zona Selamat Sekolah (ZSS)		
11	Jumlah persimpangan wajib APILL yang sudah terpasang APILL	4	4

Sumber : Dishubkominfo, 2016

Apabila diperhatikan, dari beberapa indikator yang ditampilkan, terdapat beberapa indikator yang mengalami peningkatan. Diantara indikator-indikator tersebut, persentase Spot Parkir On street yang tertata meningkat hampir 11 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan hasil dari kegiatan penataan parkir on street di jalan Angkatan 45 Kota Wonosobo yang berupa perubahan arah parkir yang mempermudah kendaraan untuk melakukan manuver tanpa mengganggu pengguna jalan. Perubahan ini dibarengi dengan pengaturan sudut parkir yang tidak terlalu menyita badan jalan.

Pada indikator Persentase terminal kewenangan kabupaten yang direvitalisasi, adanya peningkatan sebesar 7 % dari tahun sebelumnya pada dasarnya bukan dikarenakan upaya yang memang ditujukan untuk merevitalisasi melainkan karena adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan Terminal Mendolo ke pemerintah pusat sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo tinggal Terminal Sawangan Saja. Adanya pelimpahan ini berakibat pada kewenangan yang makin kecil yang mengakibatkan perubahan perhitungan besaran indikator Persentase terminal kewenangan kabupaten yang direvitalisasi.

Penambahan persentase angkutan umum laik pakai sebagian besar dipicu oleh penyegaran armada angkutan umum yang memang sudah habis masa umur teknisnya. Meskipun ada kecenderungan bahwa sebagian besar armada angkutan umum sudah mulai menurun kelayakan teknisnya akan tetapi sebagian besar yang beroperasi yaitu sebesar 69 % masih dapat dikatakan layak secara teknis.

Peningkatan pada indikator Persentase sekolah di tepi jalan protokol yang terpasang Zona Selamat Sekolah (ZSS) mengalami peningkatan hampir 20% dari tahun sebelumnya dengan adanya pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZSS) di wilayah Kertek. Hingga tahun 2016, dari keseluruhan 6 titik yang secara teknis membutuhkan fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZSS) hanya tinggal 3 titik yang belum terpasang.

Tabel IV.C.9.3
Elemen Data Urusan Perhubungan Tahun 2016

No.	Indikator	Tahun	
		2015	2016
1	Jumlah kendaraan angkutan barang	12.152	8.934
2	Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum	1.181	1.056

Sumber : Dishubkominfo, 2016

IV.C.9. **Urusan Wajib Perhubungan**

Jumlah kendaraan angkutan barang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari angka sebesar 12.152 buah di tahun sebelumnya, pada 2016 angka tersebut menurun menjadi hanya 8.934 buah kendaraan barang saja. Penurunan ini terkait dengan adanya kebijakan pada Undang-Undang yang mengatur tentang angkutan umum dimana sesuai dengan ketentuan, untuk mempermudah proses subsidi pajak maka kendaraan angkutan barang harus dibarengi dengan status berbadan hukum. Hal tersebut berimbas pada angkutan barang yang dimiliki oleh non badan hukum tidak boleh dioperasikan.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perhubungan antara lain:

Tabel IV.C.9.4
Permasalahan dan Solusi Urusan Perhubungan Tahun 2016

Permasalahan	Solusi
▪ Laju pertumbuhan kendaraan pribadi ini terutama sepeda motor. ▪ Pertumbuhan mobilisasi sarana transportasi yang sudah tidak seimbang dengan penyediaan prasarana transportasi terutama prasarana jalan yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik/simpul jalan pada saat jam sibuk. ▪ Lalu lintas campur antara pergerakan antar kabupaten dengan pergerakan lokal seringkali menimbulkan konflik baik kemacetan, kecelakaan maupun ketidaknyamanan di dalam perjalanan. ▪ kondisi topografis pegunungan mengakibatkan banyaknya turunan curam yang rawan kecelakaan. ▪ Kurang seimbangnya antara jumlah trayek kendaraan umum dengan pengguna angkutan menyebabkan banyaknya angkutan yang mangkal atau mengetem di pinggir jalan. Akibatnya timbul terminal bayangan/pangkalan kendaraan angkot/microbus pada titik titik tertentu. ▪ Tidak meratanya persebaran angkutan,	▪ Pengembangan sistem pelayanan transportasi angkutan umum yang lebih nyaman dan dapat diandalkan bagi penumpang sehingga akan dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. ▪ Pembangunan gedung parkir terintegrasi yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. ▪ Pengaturan parkir progresif dan berlangganan pada beberapa kantong parkir. ▪ Menggalakan program safety riding dan sosialisasi kesadaran berlalu lintas. ▪ Penambahan pemasangan perlengkapan keselamatan jalan. ▪ Audit keselamatan jalan ▪ Pemberian training terutama untuk pengemudi angkutan umum ▪ Pengontrolan muatan pada untuk angkutan barang di Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan timbangan portabel untuk mengukur tonase angkutan barang dan dilakukan penertiban secara berkala ▪ Pembangunan kawasan terminal angkutan barang

Permasalahan	Solusi
sehingga ada yang kelebihan angkutan (<i>over supply</i>) dan ada yang kekurangan angkutan (<i>over demand</i>) pada pelayanan angkutan umum yang a ▪ Belum optimalnya pelaksanaan manajemen transportasi perhubungan darat ▪ Makin banyaknya angkutan barang yang melebihi muatan sehingga berakibat pada rusaknya jaringan jalan akibat beban yang kurang sesuai dengan kapasitas tonase jalan. ▪ Belum optimalnya pengoperasian terminal tipe A Mendolo ▪ Belum optimalnya penataan parkir terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena manuver parkir ▪ Belum optimalnya manajemen transportasi perhubungan darat ▪ Masih rendahnya kualitas prasarana perhubungan darat ▪ Masih kurangnya jaringan transportasi perhubungan darat	▪ Pengujian KIR kendaraan bermotor sampai dengan pada uji kendaraan pribadi. ▪ Penggalakkan program uji secara priodik pada ruas jalan terpilih untuk uji emisi. ▪ Pengembangan sistem pelayanan transportasi angkutan umum yang lebih nyaman dan dapat diandalkan bagi penumpang sehingga akan dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. ▪ Pembangunan gedung parkir terintegrasi yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. ▪ Pengaturan parkir progresif dan berlangganan pada beberapa kantong parkir. ▪ Menggalakan program safety riding dan sosialisasi kesadaran berlalu lintas. ▪ Penambahan pemasangan perlengkapan keselamatan jalan. ▪ Audit keselamatan jalan ▪ Pemberian training terutama untuk pengemudi angkutan umum ▪ Pengontrolan muatan pada untuk angkutan barang di Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan timbangan portabel untuk mengukur tonase angkutan barang dan dilakukan penertiban secara berkala ▪ Pembangunan kawasan terminal angkutan barang ▪ Pengujian KIR kendaraan bermotor sampai dengan pada uji kendaraan pribadi. ▪ Penggalakkan program uji secara priodik pada ruas jalan terpilih untuk uji emisi. ▪ Pengembangan angkutan umum massal dan teknologi mesin ramah lingkungan